

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kewenangan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antara daerah di Indonesia (Adi,2005). Oleh karena itu pemerintah daerah harus menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan sebagai suatu bentuk akuntabilitas pemerintah untuk dan mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan Pemerintah daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi

dan laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah adalah dengan mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah,1995) dalam Pangalila (2014). Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah (Sari,2016). ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka akan memiliki tekanan yang besar dalam memberikan pelayanan dan penyajian laporan keuangannya kepada masyarakat.

Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah dari transfer pemerintah pusat (Suhardjanto *et al.*,2010) dalam Nugroho dan Prasetyo (2018).

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas umum, dan pengembangan sisten jaminan sosial .

Leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut (Kusumawardani,2012).

Kusumawardani (2012) meneliti tentang pengaruh *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan *size* dan ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Maiyora (2016) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pulau Sumatera. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ukuran pemerintah daerah (*size*) dan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, kemakmuran, ukuran legislatif dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Aziz (2016) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel independen ukuran (*size*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Nugroho dan Prasetyo (2018) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan, *size* dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aziz (2016). Dalam penelitian tersebut dibahas tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu, *leverage*. Dilihat dari obyek penelitian sebelumnya menggunakan studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun dalam penelitian ini menggunakan studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2016.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu : Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KAREKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (studi empiris pada kabupaten/kota di Jawa Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia.

2. Implikasi Praktis

a. Pihak pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

b. Pihak Masyarakat

penelitian ini digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir logis, serta hipotesis yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.